

Slawi, 22 Januari 2024

Nomor : 0120/B-TGR/I/2024

Lampiran : satu berkas

Kepada Yth,

Pimpinan DPP Perbarindo

Jl. Jendral Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10510

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance)
PT BPR BANK TGR (PERSERODA)

Dengan hormat,

Merujuk pada surat DPP Perbarindo Nomor 020/DPP-Perbarindo/I/2024 tentang Himbauan Laporan Tata Kelola BPR Periode Tahun 2023 melalui Perbarindo dan Majalah media BPR bahwa BPR wajib menyampaikan Laporan Tata Kelola paling lambat tanggal 31 Januari 2024 agar dilaporkan juga kepada Perbarindo sebagai Asosiasi dan Majalah Media BPR dan BPRS secara Online pada Sistem Informasi Perbarindo (SIP) melalui website <http://www.perbarindo.org>. Bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT BPR BANK TGR (PERSERODA) untuk posisi akhir Desember 2023.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami,



PT. BPR BANK TGR (PERSERODA)
BANK TGR
TEGAL GOTONG ROYONG

Ahmad Efendi, SE., MSI,

Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665466-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600641-
11012024111112

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprtgr@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-11 11:11:12



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR BANK TGR (PERSERODA)
TAHUN 2023**



**JL Jend. A. Yani No. 11 Procot - Slawi Kab. Tegal - Jawa Tengah
TELEPON: (0283) 491570**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Manajemen PT BPR Bank TGR (Perseroda) berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Bank TGR (Perseroda) Tahun 2023 disusun mengacu pada Surat Edaran OJK nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. PT BPR Bank TGR (Perseroda) menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR "Terwujudnya BPR yang sehat dan terus tumbuh seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat".
2. Mendukung misi BPR "Menjadi BPR sebagai penyedia jasa keuangan yang mengakar dan menyebar dimasyarakat dengan meningkatkan peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga ; Meningkatkan fungsi dan peran BPR sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah".
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan stakeholder / pemangku kepentingan kepada BPR.

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (TARIF) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	AHMAD EFENDI, SE, MSi
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	NURUL HUDA, SE

Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :		
a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt. c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko. e. Memastikan budaya kerja perusahaan berjalan dengan baik		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
1. Direksi telah menindaklanjuti temuan atas pemeriksaan OJK dengan sistem core banking terkait APU PPT agar dapat memfasilitasi notifikasi DTTOT, fitur untuk WIC, identifikasi LTKT dan LTKM. Direksi memastikan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan terkait APU dan PPT secara berkala. Terkait hal tersebut pihak Vendor belum dapat secara optimal memfasilitasi terkait temuan APU dan PPT diatas. 2. Direksi telah menindaklanjuti terkait Evaluasi kinerja perusahaan sampai dengan bulan Februari 2023 rata - rata belum mencapai target RBB yang ditentukan dan telah melakukan upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target RBB 2023 dengan meningkatkan kinerja pada setiap lini. 3. Direksi telah minindaklanjuti terkait evaluasi kinerja perusahaan bulan April 2023 oleh dewan komisaris bahwa nilai NPL masih cukup tinggi yang memerlukan perhatian khusus dan telah melakuakn upaya optimal agar menurunkan nilai kredit bermasalah serta mengedepankan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit. 4. Meningkatkan pencapaian target simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan biaya bunga rendah melalui kegiatan literasi, promosi dan SDM bidang dana yang mencukupi. 5. Evaluasi kinerja perusahaan sampai dengan bulan Agustus 2023 direksi diharapkan fokus dalam penanganan kredit bermasalah mengingat nilai NPL yang meningkat pada posisi bulan Juni 2023, optimalisasi biaya yang dikeluarkan, optimalisasi fungsi SKAI dalam pengendalian internal dan pelaksanaan sosialisasi serta refreshment APU PPT bagi semua pegawai setiap satu tahun sekali telah dilakukan pada bulan Juni tahun 2023. 6. Menindaklanjuti atas temuan OJK tahun pemeriksaan 2023 untuk lebih menghindari kesalahan berulang dalam pencatatan akutansi dan administrasi perbankan 7. Optimalisasi pelaksanaan fungsi kepatuhan disetiap lini organisasi dalam mematuhi kebijakan, ketentuan dan internal maupun eksternal dalam pencatatan akutansi dan kegiatan operasional perbankan		
Penjelasan Lebih Lanjut :		
8. Peningkatan fungsi Satuan kerja audit internal untuk lebih mengoptimalkan pemantauan		

dan pengawasan atas pencatatan akutansi, administrasi dan kegiatan operasional Bank

9. Direksi telah menetapkan limit resiko sesuai dengan tingkat risiko risk appetite dan risk tolerance sebagaimana SK Direksi. dan telah melakukan pemantauan setiap bulan yang dilakukan oleh bidang manajemen risiko.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	TEGUH PURWITO, SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	1. Temuan atas pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti terkait dengan sistem core banking terkait APU PPT agar dapat memfasilitasi notifikasi DTTOT, fitur untuk WIC, identifikasi LTKT dan LTKM. Direksi memastikan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan terkait APU dan PPT secara berkala. 2. Evaluasi kinerja perusahaan sampai dengan bulan Februari 2023 rata - rata belum mencapai target RBB yang ditentukan dan upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target RBB 2023		

3. Evaluasi kinerja perusahaan bulan April 2023 nilai NPL masih cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian khusus dan upaya optimal agar menurunkan nilai kredit bermasalah serta mengedepankan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit.
4. Meningkatkan oencapaian target simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan biaya bunga rendah melalui kegiatan literasi, promosi dan SDM bidang dana yang mencukupi.
5. Evaluasi kinerja perusahaan sampai dengan bulan Agustus 2023 direksi diharapkan fokus dalam penanganan kredit bermasalah mengingat nilai NPL yang meningkat pada posisi bulan Juni 2023, optimalisasi biaya yang dikeluarkan, optimalisasi fungsi SKAI dalam pengendalian internal dan pelaksanaan sosialisasi serta refreshment APU PPT bagi semua pegawai setiap satu tahun sekali
6. Menindaklanjuti atas temuan OJK tahun pemeriksaan 2023 untuk lebih menghindari kesalahan berulang dalam pencatatan akutansi dan administrasi perbankan
7. Optimalisasi pelaksanaan fungsi kepatuhan disetiap lini organisasi dalam mematuhi kebijakan, ketentuan dan internal maupun eksternal dalam pencatatan akutansi dan kegiatan operasional perbankan
8. Satuan kerja audit internal untuk lebih mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan atas pencatatan akutansi, administrasi dan kegiatan operasional Bank
9. Direksi agar menetapkan limit resiko sesuai dengan tingkat risiko risk appetite dan risk tolerance sebagaimana SK Direksi.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasdi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasdi dan Nominasi	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-

	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AHMAD EFENDI, SE, MSi	Rp0	0%
2.	NURUL HUDA, SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham pada BPR. Saham dimiliki 100% oleh pemerintah Kabupaten Tegal.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	AHMAD EFENDI, SE, MSi	-	-	0%
2.	NURUL HUDA, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	AHMAD EFENDI, SE, MSi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	NURUL HUDA, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi PT. BPR Bank TGR (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Bank				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	AHMAD EFENDI, SE, MSi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	NURUL HUDA, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi PT. BPR Bank TGR (Perseroda) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	TEGUH PURWITO, SE	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Komisaris tidak memiliki saham pada BPR. Saham 100% dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	TEGUH PURWITO, SE	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	TEGUH PURWITO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris PT. BPR Bank TGR (Perseroda) merupakan Komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	TEGUH PURWITO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris PT. BPR Bank TGR (Perseroda) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp649.478.466	2	Rp235.736.626
2.	Tunjangan	2	Rp22.000.000	0	Rp0
3.	Tantiem	2	Rp47.386.519	2	Rp18.954.608
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp27.061.603	2	Rp10.824.641
Total			Rp745.926.588		Rp265.515.875
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tunjangan Perumahan (22000000)	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil kendaran roda 4 (2)	Sepeda Motor (1)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (7860960)	BPJS Kesehatan (7000000)
4.	Fasilitas Lainnya	Laptop (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Sesuai SK Direksi nomor 333b /KEP.DIR/B-TGR/V/2021 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Direksi dan Pegawai BPR Bank TGR bahwa Tunjangan Rumah atau Pengganti Sewa Rumah Direktur Utama sebesar Rp. 12.000.000,- dan Direktur sebesar Rp. 10.000.000,- Sesuai dengan berita acara serah terima barang inventaris nomor 563/INV/B-TGR/XII/2020 bahwa Direktur Utama menerima fasilitas inventaris satu buah Mobil Toyota Innova Tahun 2022. Direktur Umum menerima fasilitas inventaris satu buah Mobil Toyota Innova Tahun 2020. Komisaris menerima fasilitas inventaris berupa satu buah Motor Honda Beat. Direksi menerima fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp. 7.860.960,- per tahun. Dewan Komisaris menerima fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp. 4.802.856,- per tahun. Sesuai dengan berita acara serah terima barang inventaris nomor 563/INV/B-TGR/XII/2020 bahwa Direktur Utama menerima fasilitas inventaris berupa satu buah Laptop Merk HP 743.240 GB. Direktur Umum menerima fasilitas inventaris berupa satu buah Laptop Merk Lenovo Athlon 3020. Direktur Utama menerima fasilitas alat komunikasi berupa Hp Samsung Galaxy A12. Direktur Umum menerima fasilitas alat komunikasi berupa Hp Samsung Galaxy A51.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.21 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.39 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	03 Januari 2023	2	Agenda : Membahas beberapa temuan OJK untuk di tindaklanjuti pada bulan Januari 2023 Pembahasan : 1. Direksi agar segera menindaklanjuti temuan OJK dalam hal melengkapi Sistem core banking TGR dalam hal sistem informasi manajemen

			penerapan APU dan PPT yaitu : a) Agara sistem mampu memunculkan notifikasi untuk calon nasabah yang memenuhi kriteria Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sehingga pegawai BPR/CS harus mealakukan verifikasi manual pada daftar DTTOT pada saat proses Know Your Customer (KYC) dilakukan. b) Adanya fitur untuk mengidentifikasi daftar nasabah Walk In Customer (WIC) yang disesuaikan dengan kriteria nasabah yang masuk dalam kriteria WC. c) Setting parameter Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ttidak dapat mengidentitaskan apabila terdapat beberapa transaksi dalam 1 (satu) hari kerja mencapai paling sedikit Rp.500.000.000 yang di kategorikan sebagai KLT. d) Agar CBS dapat menyediakan laporan khusus terkait LTKT dan LTKM secara periode. 2. Selain kelmaan sistem di atas,agar bias segera di perbaiki, Pengkinian data nasabah agar bisa dilakukan update data secara berkelanjutan. 3. Dan juga agar direksi memastikan bahwa seluruh pegawai,khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala. 4. Standar Opeating Prosedur (SOP) Pick Up / Jemput Bola untuk Pick up service setoran kredit agar di lengkapi sesuai hasil temuan dan Administrasi slip agar di lengkapi dengan penomeran dan terdistribusi dengan baik.
--	--	--	--

2.	25 Januari 2023	2	AGENDA : Evaluasi Kinerja Desember 2023 PEMBAHASAN : Data-data pencapaian PT.BPR Bank TGR Periode Desember 2022 adalah sebagai berikut : 1.Antar Bank Passiva (ABP) Dari tabel menunjukan pencapaian ABP posisi Desember 2022 menunjukan belum sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan dengan prosentase 15,16% -RBB = Rp.15.650.000 -Realisasi = Rp.23.500.000 2.Non Performing Loan (NPL) Dengan melihat data bahwa NPL masih belum tercapai sesuai dengan target RBB Desember secara prosentase (%) maupun secara absolut/ rupiah dengan data sebagai berikut: -RBB = Rp 4.991.470 -Realisasi = Rp 14.127.000 Atau secara prosentase target RBB untuk Non Performing Loan (NPL) adalah 4,39 % namun hanya tercapai sebesar 11,22% 3.Dalam Perhatian Khusus (DPK) Dengan melihat data untuk kolektibilitas DPK masih belum sesuai dengan Rencana Bisnis Desember 2022 atau berdasarkan data sebagai berikut : -RBB = Rp. 13.031.646 -Realisasi = Rp. 15.302.032 Selisish= Rp.2.270.386 4.Beban Operasional Beban operasional posisi Desember 2022 adalah sebesar 17.140.192 ribu atau secara prosentase adalah 107,44% lebih besar dari targer RBB yang ditentukan sebesar 15.953.974 ribu. 5.Laba Laba Posisi bulan Desember 2022 masih belum tercapai sesuai dengan RBB yang di tentukan atau
----	-----------------	---	---

			hanya tercapai sebesar 96,58%
3.	13 Maret 2023	2	AGENDA : Pembahasan Kinerja Bulan Februari 2023 PEMBAHASAN : 1.Asset Pencapaian Asset pada bulan februari masih jauh dari target RBB bank, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor anatara lain jumlah KYD, Tabungan dari Deposito yang masih dibawah dari target RBB yang ditentukan. 2.Kredit Yang Diberikan Pencapaian KYD di bulan februari hanya tercapai sebesar 92,21% dari target RBB yang di tentukan, Dewan Komisaris menyarankan agar di tingkatkan lagi kinerja pegawai yang membawahi kredit terutama dalam hali : a. Ekspansi Kredit Sebagai salah satu faktor penunjang tercapainya targer RBB, Kredit harus tercapai b. Kolektibilitas DPK Kredit dengan kualitas 2 atau dalam erhatian khusus harus bisa di perhatikan lagi agar,kualitas kredit DPK bisa kembali lancar dan tidak ada tunggakan karena apabila tunggakan bisa tertagih akan menambah jumlahh pendapatan operasional. 3. Non Performing Loan (NPL) Dengan melibat data tersebut diatas bahwa NPL masih belum tercapai sesuai dengan target RBB februari secara prosentase (%) maupun secara absolut/ruipah Hal ini disebabkan karena banyaknya restrukturisasi covid yang di sesuaikan koletibilitas nya sesuai dengan permintaan pengawasan OJK pada saat pemeriksaan. Maka dengan ini Dewan Komisaris meyarankan untuk melakukan langka-

			langka penyelesaian NPL seperti melakukan gugatan sederhana Somasi dan melalui Lelang KPKNL khususnya untuk nasabah dengan plafon kredit ditas 500 jt. 4. Beban Operasional Beban Operasional posisi february menunjukkan nilai yang sudah melebihi target yang ditentukan,karena adanya pembentukan biaya PPAP yang disesuaikan dengan POJK yang berlaku. Hal ini agar menjadi perhatian untuk direksi PT.BPR ANK TGR karena dengan besarnyaBeban Operasional tentu berpengaruh ke LABA. 5. LABA Laba posis february masih belum tercapai sesuai dengan RBB yang ditentukan dan mengalami kerugian,selain perlunya melakukan efisiensi biaya,Dewan Komisaris juga menyarankan untuk memberikan edukasi kepada nasabah kredit dengan kolektibilitas lancar agar tetap menjaga angsurannya supaya tidak terlambat bayar angsuran karena akan dikenakan denda. Tentunya hal ini selain merugikan nasabah sendiri juga berpengaruh kepada pendapatan Bunga yang di terima oleh bank. 6. APU-PPT Dewan komisaris ikut monitoring APU-PPT melalui direksi maupun petu
4.	16 Juni 2023	2	AGENDA : Pembahasan Kinerja Bulan Mei 2023 PEMBAHASAN : 1.Asset Asset Bank tidak tercapai sesuai rencana kerja dari yang direncanakan sebesar 159.915.329 ribu hanya tercapai 155.838.286 ribu atau 97,45%. Ketidak tercapaian tersebut akibat tidak tercapainya rencana intermediasi bank baik dalam bentuk kredit

			maupun simpanan (Deposito) 2.Kredit Yang Diberikan (KYD) Kredit yang diberikan Bank tidak tercapai sesuai rencana kerja dari yang direncanakan sebesar 138.190.149 ribu hanya tercapai 128.414.004 ribu atau 92,93% Namun demikian kami mengingatkan untuk tetap berpedoman pada prinsip ke hati-hatian Bank dalam meningkatkan pencapaian kredit. Untuk kredit yang perlu menjadikan catatan adalah meningkatnya NPL yang signifikan, sehingga dari yang direncanakan 5,17% tercapai 16,10% atau melampaui dari persentase (%) NPL yang ideal yaitu dibawah 5%. Adapun peningkatannya Nominal NPL menjadi sebesar 20.673.262 ribu yang mengindikasikan NPL terus naik, mengingat Nominal NPL bulan April 17.559.790 ribu agar menjadi skala prioritas utama manajemen dalam penanganan Kredit bermasalah agar kondisi NPL tidak semakin memburuk. 3.Simpanan Nasabah Simpanan dalam bentuk Tabungan tercapai namun dalam bentuk Deposito tidak tercapai sesuai rencana bisnis bank, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk Tabungan tercapai 100,18% dan Deposito 95,99%. 4. Antar Bank Passiva (ABP) Dari tabel pencapaian ABP posisi Mei 2023 menunjukkan tidak tercapai sesuai rencana atau hanya tercapai 83,94%. Tentunya ketidaktercapaian ABP tersebut juga disesuaikan dengan kondisi Likuiditas Bank mengingat beban bunga ABP Bank juga sangat besar, sehingga penurunan ABP tersebut dapat diimbangi dengan perolehan dana simpanan pihak III dengan beban yang lebih murah. 5. Beban Operasional Beban Operasional posisi Mei 2023 adalah sebesar 8.105.885 ribu atau secara prosentase melebihi dari
--	--	--	---

			yang direncanakan atau mencapai 104,17% lebih besar dari target RBB yang ditentukan sebesar 7.781.110 ribu. 6.Laba Laba posisi bulan Mei tidak tercapai dari rencana bisnis bank atau hanya tercapai -29,65% (minus). Kondisi tersebut selain beban biaya yang telah melampaui dari yang direncanakan juga pendapatan operasional hanya tercapai 91,21% dari yang direncanakan sebesar 8.653.500 ribu sedang tercapainya 7.893.111 ribu.
5.	08 September 2023	5	AGENDA : Teknik pengembalian laba tahun buku 2022 atas sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan OJK Tegal pada tanggal 03 Juli 2023 PEMBAHASAN : Atas laporan hasil pemeriksaan OJK Tegal laporan keuangan tahun buku 2022 terdapat koreksi pada pendapatan maupun biaya sehingga laba tahun 2022 terkoreksi pada pendapatan maupun biaya sehingga laba tahun 2022 terkoreksi sebagai berikut : a. Terhadap hasil pemeriksaan rutin tahunan oleh OJK atas koreksi laba tahun 2022 dan telah dilakukan kunjungan serta konsultasi kepada KAP Indarto Waluyo yang telah menerima hasil koreksi tersebut dan bersedia untuk melakukan restatement terhadap hasil pemeriksaan KAP Tahun 2022 agar di Tindaklanjuti dengan RUPS tindaklanjut restatement laporan keuangan tahun 2022. b. Hasil RUPS tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan pengembalian kelebihan setoran deviden atas laba tahun 2022 yang telah diterima oleh Pemerintah Kab.Tegal

6.	06 Oktober 2023	5	AGENDA : 1. Persetujuan atas Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Direksi PT.BPR BANK TGR (Perseroda) Hasil Restatemen KAP Indarto dan Yudhika. 2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun 2022 Hasil Restatemen KAP Indarto dan Yudhika. 3. Persetujuan Pembagian Deviden Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 Hasil Restatemen KAP Indarto dan Yudikha 4. Menetapkan agenda tambahan: - a.Reorganisasi Komisaris utama - b.Peralihan fungsi direksi 5. Penandatanganan Notulen Hasil RUPS PEMBAHASAN : 1. Dalam rangka memeuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.6 Tahun 2020 pasal 21 ayat (3) bahwa laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang di tanda tangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan dimaksud disampaikan kepada RUPS untuk disyahkan. 2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kab.Tegal Nomor 6 tahun 2020 bahwa Direksi mmbuat laporan tahunan yang telah disahkan RUPS untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah,Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Kantor OJK Tegal. 3. Dalam Pembahasan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut : a) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 pasal 24 ayat 2 bahwa Komposisi dan Penggunaan laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS-LB b) Sesuai dengan Ketentuan Permendagri Nomor 94 tahun 2017 pasal 82 (3) bahwa laba bersih BPR
----	-----------------	---	---

		setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah /RUPS-LB meliputi : a. Deviden Pemerintah Daerah 55% (Lima Puluh Lima per seratus) b. Cadangan Umum 10% (Sepuluh per seratus) c. Cadangan Tujuan 10% (Sepuluh per seratus) d. Tanggung Jawab sosial lingkungan perusahaan/ CSR 3% (Tiga per seratus) e. Tantiem 4% (Empat per seratus) f. Jasa Produksi 8% (Delapan per seratus) g. Dana Kesejahteraan 4. Mencermati Restatemen KAP Indarto dan Yudikha perlu dilakukan revisi atas hasil RUPS. 5. Memberikan dengan Hormat Muhammad Sholeh S.Sos,M.Si sebagai Komisaris UTama PT.BPR BANK TGR (PERSERODA) untuk keperluan reorganisasi dan agar segera direksi melakukan proses pembentukan kepanitiaan rekrutmen komisaris utama. 6. Menetapkan Ahmad Efendi SE,M.Si sebagai Direktur Utama yang membawahi fungsi kepatuhan dan Nurul Huda SE sebagai Direktur Bisnis berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun : RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang undang. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah dari jajaran pemegang saham atau yang mewakili, Dewan Komisaris dan Direksi. Sepanjang tahun anggaran 2023 penyelenggaraan RUPS enam kali, RUPS yang pertama diselenggarakan pada Hari Selasa,3 Januari 2023 bertempat di Ruang Dewan Komisaris PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi. RUPS yang kedua diselenggarakan pada Hari Rabu,25 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi. RUPS yang ketiga diselenggarakan pada Hari Senin,13 Maret 2023 pada jam 10.00 WIB-12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat PT BPR Bank TGR		

(Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi. RUPS yang ke empat diselenggarakan pada Hari Jumat 16, Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi. RUPS yang ke lima diselenggarakan pada Hari Jumat 08 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi. RUPS yang ke enam diselenggarakan pada Hari Jumat 06 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi. Hasil dari RUPS tersebut telah di notariilkan oleh Notaris Evi Dwi Kamawati, SH, MKn.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	TEGUH PURWITO, SE	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dikarenakan Kondisi Komisaris Utama yang mengalami sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja kembali maka dilakukan reorganisasi pada susunan Dewan Komisaris yaitu pemberhentian Komisaris Utama pada bulan Oktober 2023 melalui RUPS, sehingga PT BPR BANK TGR (PERSERODA) hanya memiliki 1 dewan komisaris.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama Tahun 2023 tidak terjadi penyimpangan internal (internal fraud) baik penyalahgunaan Jabatan Maupun Penyalahgunaan keuangan								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT BPR Bank TGR (Perseroda) selama tahun 2023.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	29 Maret 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA	DINAS KOMINFO	Rp5.000.000

			PEMBANGUNAN CAFE MEDIA DINAS KOMINFO		
2.	29 Maret 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA MILAD SLKT KE-12	YAYASAN SLKT KAB.TEGAL	Rp1.000.000
3.	14 April 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA KEGIATAN SANTUNAN YATIM PIATU,JANDA DAN FAKIR MISKIN PK.LINDU AJI KEC.ADIWERNA	PK.LINDU AJI KEC.ADIWERNA	Rp500.000
4.	14 April 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN KETUPAT LEBARAN FOKUS DIALOG	FOKUS DIALOG	Rp100.000
5.	17 April 2023	Sosial	PERMOHONAN ZAKAT/INFAQ/ SHODAQOH UNTUK PANTI ASUHAN DARUL AITAM WA DHUAFA	PANTI ASUHAN DARUL AITAM WA DHUAFA	Rp500.000
6.	18 April 2023	Sosial	PERMOHONAN BANNTUAN UNTUK ORANG TUA ASUH STANTING KEC.SLAWI	PEMKAB.TEGAL KEC.SLAWI	Rp1.620.000
7.	29 April 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN KEGIATAN AKSI PRAMUKA PEDULI KEMANUSIAAN PEMBAGIAN TAJIL	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR TEGAL	Rp500.000

8.	29 April 2023	Sosial	PERMOHONAN ZAKAT MAL,INFAQ,DAN SEDEKAH UNTUK YAYASAN KAWIT AN-NUR SLAWI	YAYASAN KAWIT ANNUR	Rp500.000
9.	23 Mei 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK KELANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)DARI MASUDIN BURUH SERABUTAN	MASUDIN BURUH SERABUTAN	Rp500.000
10.	08 Juni 2023	Sosial	PERMOHONAN DANA SPONSORSHIP UNTUK KEGIATAN ACARA PERPISAHAN SISWA DIDIK SLB MANUNGAL	SLB MANUNGAL SLAWI	Rp1.000.000
11.	21 Juni 2023	Sosial	KONTRIBUSI HARLAH GP ANSOR KE-89 PC GP ANSOR KAB.TEGAL	PC GP ANSOR KAB.TEGAL	Rp1.000.000
12.	27 Juni 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN PEMBAYARAN HEWAN QURBAN SETDA KAB.TEGAL	SETDA KAB.TEGAL	Rp6.000.000
13.	26 Juni 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA SPONSORSHIP	SETDA KAB.TEGAL	Rp3.300.000

			KEGIATAN JATENG FAIR 2023		
14.	11 Juli 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN SEDEKAH ACARA DZIKRUL GHOFILIN MASJID AGUNG SLAWI	MASJID AGUNG SLAWI	Rp400.000
15.	20 Juli 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA KEGIATAN PERINGATAN HARI KOPERASI NASIONAL	PANITIAN HARKOP KE-76	Rp1.000.000
16.	21 Juli 2023	Sosial	PERMOHONAN PARTISIPASI RUWAT BUMI OW GUCI KAB.TEGAL	DINAS PORAPAR	Rp500.000
17.	21 Juli 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA PARTISIPASI UNTUK IKATAN PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA TEGAL	IPEKB JATENG	Rp1.000.000
18.	24 Juli 2023	Sosial	GERAKAN PEMBAGIAN BENDERA BENDERA MERAH PUTIH TAHUN 2023	SETDA KAB.TEGAL	Rp500.000
19.	02 Agustus 2023	Sosial	SUMBANGAN DANA UNTUK MENGADAKAN TURNAMEN SEPAK BOLA "KAPOLRES	KAPOLRES TEGAL	Rp500.000

			TEGAL CUP 1 THN"		
20.	12 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN SUMBANGAN DANA UNTUK PANITIA HUT RI DESA JATINEGARA	PANITIA HUT RI DESA JATINEGARA	Rp250.000
21.	12 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK PANITIA HUT RI DESA BANDASARI KEC.DUKUHTURI	PANITIA HUT RI DESA BANDASARI	Rp100.000
22.	12 Agustus 2023	Sosial	PROPOSAL TURNAMEN BOLA VOLI DINSOS CUP TAHUN 2023	DINAS SOSIAL KAB.TEGAL	Rp500.000
23.	12 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK DHARMA WANITA PERSATUAN DINAS DIKBUD ACARA LOMBA "MENYAMBUT HUT RI"	PANITIA HUT RI DARMA WANITA DINAS DIKBUD	Rp500.000
24.	14 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA SPONSORSHIP UNTUK PANITIA TURNAMEN SEPAK BOLA KALIWUNGU OPEN 2023 KEC.BALAPULANG	PANITIA TURNAMEN SEPAK BOLA KALIWUNGU OPEN 2023	Rp1.000.000
25.	14 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN	PANITIAN PERINGATAN	Rp200.000

			DOORPRIZE KEGIATAN JALAN SANTAI UNTUK KEC.PAKEMBARAN	HUT RI KEC.PAKEMBARAN	
26.	14 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN PARTISIPASI DANA UNTUK PANITIA RI KEC.BUMIJAWA	PANITIA HUT RI KEC. BUMIJAWA	Rp250.000
27.	16 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN PARTISIPASI DANA UNTUK PANITIA KEC.BOJONG	PANITIA HUT RI KEC.BOJONG	Rp300.000
28.	16 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN SNACK UTUK PANITIA HUT RI KEC.KRAMAT	PANITIA HUT RI KEC.KRAMAT	Rp250.000
29.	19 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN PARTISIPASI DANA UNTUK PANITIA RI KEC.PAGERBARANG	PANITIA HUR RI KEC.PAGERBARANG	Rp250.000
30.	19 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN SPONSORSHIP UNTUK DINAS PENDIDIKAN ACARA LOMBA" HUT RI KE-78	PANITIA HUT RI DINAS PENDIDIKAN	Rp3.000.000
31.	19 Agustus 2023	Sosial	PERMOHONAN SPONSORSHIP UNTUK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ACARA HUT RI DI BPKAD	BPKAD	Rp943.500

32.	25 Agustus 2023	Sosial	PENGAJUAN PERLATAN OLAHRAGA KARATE UNTUK "INTAI TEAM GARUDA"	INTAI TEAM GARUDA	Rp500.000
33.	27 Juni 2023	Sosial	PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK HEWAN QURBAN IKATAN WARTAWAN ONLINE	IKATAN WARTAWAN ONLINE	Rp500.000
34.	08 Mei 2024	Sosial	KEGIATAN SAFARI RAMADHAN	PERBARINDO DPK TEGAL	Rp1.000.000
35.	10 Oktober 2023	Sosial	KEGIATAN KONFERENSI IPNU DAN IPPNU TAHUN 2023	IPNU-IPPNU KAB. TEGAL	Rp2.000.000
36.	31 Oktober 2023	Sosial	PORSENI AKBAR IPNU-IPPNU SEWASUKRA	IPNU-IPPNU SEWASUKRA	Rp1.000.000
37.	31 Oktober 2023	Sosial	PORDES DAN SENI KARANG TARUNA KAB. TEGAL	KARANG TARUNA KAB. TEGAL	Rp1.000.000
38.	31 Oktober 2023	Sosial	KEGIATAN HIPRADA PENGURUS CABANG KAB. TEGAL	PENGURUS CABANG HIPRADA KAB. TEGAL	Rp1.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
BANTUAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK PADA TAHUN 2023 SEBESAR Rp 39.963.500					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BANK TGR (PERSERODA)
Alamat	: JL Jend. A. Yani No. 11 Procot - Slawi Kab. Tegal - Jawa Tengah
Nomor Telepon	: (0283) 491570
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp17.806.568.690
Total Aset	: Rp208.149.196.617

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BANK TGR (PERSERODA) Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.31	0.262
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.04	0.306
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.26	0.226
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.08	0.208
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028

8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.07	0.207
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	1.90	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.90	0.143
Nilai Komposit			1.900
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.31)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,31 yang termasuk kategori Predikat Sangat Baik.

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta sudah sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip- prinsip Good Corporate Governance, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.04)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,04 yang termasuk kategori Predikat Baik.

- Jumlah, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip- prinsip Good Corporate Governance, telah berjalan efektif dan meskipun masih ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara cukup efektif.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Dikarenakan PT BPR Bank TGR (Perseroda) termasuk dalam bobot faktor BPR B maka untuk penilaian kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite tidak dilakukan penilaian.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Penanganan Benturan Kepentingan Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2 yang termasuk kategori Predikat Baik.

- Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.26)

Penerapan Fungsi Kepatuhan Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,26 yang termasuk kategori Predikat Baik.

- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.
- Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.08)

Penerapan Fungsi Audit Intern Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 2,08 yang termasuk kategori Predikat Baik.

- Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/ dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,1 yang termasuk kategori Predikat Sangat Baik.

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.

- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP yang independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sudah terdaftar pada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.07)

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern termasuk dalam predikat baik dengan nilai komposit 2.07.

- Bank telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko.
- Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan limit Risiko.
- Bank memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan.
- Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen risiko dan pertanggungjawaban direksi atas kebijakan tersebut
- Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
- Bank menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

Batas maksimum pemberian kredit nilai komposit yang diperoleh adalah 2 termasuk dalam predikat baik.

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelanggaran BMPK, Bank memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/ debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

Rencana bisnis Bank memperoleh nilai komposit sebesar 1,9 dengan predikat baik

- Direksi telah menyusun Rencana bisnis dan disetujui oleh dewan komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
- Rencana Bisnis Bank menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan bank yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Dean komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan memperoleh nilai komposit 1,9 termasuk dalam predikat baik.

- Bank telah menyediakan sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan
- Bank telah menyusun laporan publikasi setiap triwulan dan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa keuangan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil self assessment yang dilakukan, hasil penilaian Good Corporate Governance pada Bank posisi Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,9 yang termasuk kategori Predikat Baik.
2. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi Good Corporate Governance di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.
3. Bank memiliki kekuatan atas implementasi Good Corporate Governance yaitu bahwa kultur Good Corporate Governance yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi Good Corporate Governance Bank semakin baik dari waktu ke waktu.
4. Direksi dan dewan komisaris Bank berkomitmen tinggi untuk melakukan improvement dalam setiap

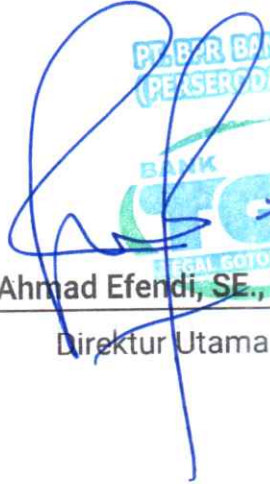
bidang dan melakukan perbaikan secara terus menerus dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.

Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance

- Dengan disusunnya SOP Good Corporate Governance PT BPR Bank TGR (Perseroda) tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketentuan internal yang disusun selalu up to date menyesuaikan dengan perubahan ketentuan yang berlaku
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Good Corporate Governance.

Slawi, 10 Januari 2024

PT BPR BANK TGR (PERSERODA)



Ahmad Efendi, SE., MSi
Direktur Utama



Teguh Purwito, SE
Komisaris